

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Manusia sebagai makhluk sosial, hidup bersama-sama antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya sehingga membentuk kelompok atau organisasi yang teratur, sistematis dan memiliki tujuan yang jelas. Misalnya organisasi politik. Untuk menyatukan organisasi politik, maka perlu menyatukan insan politik dan kaitannya dengan sistem politik. (Chotib dkk, 2007).

Sistem politik di Indonesia saat ini setelah berlansungnya reformasi 1998 sangat erat kaitannya dengan demokrasi. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam proses politik menunjukkan suatu citra bahwa demokrasi sedang berlansung di Negeri ini. Fenomena yang menarik ialah terbukanya pintu demokrasi di Indonesia setidaknya memberikan peluang bagi masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses politik. Penulis katakan menarik karena fenomena ini juga terjadi pada masyarakat Suku Laut yang memang sejak lama peran mereka terpisahkan dalam kehidupan sosial politik pada umumnya, mereka dikategorikan kelompok masyarakat adat terpencil. Namun, kiranya marjinalisasi ini tidak bertahan lama setelah sebagian besar dari mereka berhasil dimukimkan dari laut ke darat.

“Suku Laut terkenal sebagai representasi masyarakat bahari, yakni masyarakat yang memiliki jiwa bahari dengan tradisi menjadikan laut sebagai basis terbentuknya kebudayaan”. (Satria, 2015: 3).

Pada tahun 2015 terlihat banyak dari masyarakat Suku Laut yang terlibat langsung dalam Pilkada Gubernur Kepulauan Riau dan ini merupakan pemilu pertama yang diikuti oleh masyarakat Suku Laut. Keikutsertaannya dalam proses tersebut menunjukkan adanya peran masyarakat Suku Laut dalam kehidupan sosial politik. Pada Pilkada Gubernur Kepri tahun 2015 setidaknya disalah satu Kecamatan yaitu Singkep Barat, berdasarkan data Kecamatan yang didapatkan, sebanyak 174 Orang daftar pemilih tetap (DPT) dari 87 kartu Keluarga (KK) yang berasal dari Suku Laut. (Indah, 2015).

Secara organisasi Suku Laut memiliki kelompok-kelompok ternak dan Forum Komunikasi Orang Laut (FKOL), Forum Silaturahmi Suku Asli (FSSA) dan Yayasan Kajang Peduli Suku Laut (YKPSL). Secara keseluruhan organisasi ini dibentuk sebagai upaya memperjuangkan hak-hak Suku Laut, baik itu pengakuan pemerintah bahwa Suku Laut merupakan penduduk asli wilayah Provinsi Kepri dengan harapan agar dapat diadakannya musyawarah besar (MUBES) Suku Laut, maupun demi mendapatkan hak yang sama sebagai warga Negara seperti masyarakat pada umumnya. (Haluankepri.com, 2010).

Adanya keinginan masyarakat Suku Laut ikut serta dalam proses-proses politik akhir-akhir ini menjadi perhatian khusus Pemerintah setempat. Bahkan demi mendapatkan hak sebagai warga Negara, mereka tidak takut untuk mereka-reka agama hanya demi memenuhi persyaratan administrasi dalam pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) di Kecamatan setempat. Namun disisi lain masih ada sebagian dari masyarakat Suku Laut yang masih tetap setia dengan kebudayaan hidup berkelana di laut dan mereka sama sekali tidak peduli akan kehidupan sosial politik. (Kompasiana, 2012).

Kehidupan sosial politik masyarakat Suku Laut juga dapat dilihat telah adanya beberapa orang dari mereka yang kini telah menjadi tenaga pengajar (guru), kemudian tenaga honorer di Pemerintah Kabupaten Lingga dan bahkan telah ada satu orang yang sudah menjadi kepala desa. Tentunya ada pergeseran orientasi politik yang terjadi pada masyarakat Suku Laut, dimana hal tersebut ditujukan terhadap Negara. (Tanjungpinang Pos, januari 2017).

Dalam melihat perubahan yang terjadi pada Suku Laut, sebuah analisis yang dilakukan oleh, Nur Supiati, yang mana analisis ini melihat pada perubahan nilai-nilai sosial yang terjadi pada masyarakat Suku Laut. Adapun pada analisisnya menyatakan bahwa, perubahan nilai-nilai sosial didominasi oleh nilai material sebesar 100% dan nilai vital sebesar 100%. Perubahan perilaku sosial Suku Laut didominasi sikap pemberani

dengan persentase sebesar 87,9% dan sifat mandiri dengan persentase sebesar 97%. Sedangkan hubungan sosial masyarakat suku laut adalah dapat diterima oleh orang lain dengan persentase sebesar 81, 8% dan kooperatif dengan persentase sebesar 75, 8%. ([Academia.edu, 2014](#)).

Beberapa fenomena yang telah disampaikan kiranya memperkuat argumentasi bahwasannya telah terjadinya pergeseran pola-pola kehidupan sosial politik masyarakat Suku Laut dari putusnya hubungan terhadap proses politik hingga ikut serta dalam proses politik yang berjalan. Untuk memperdalam kajian terkait aspek-aspek politik masyarakat Suku Laut tentunya sangat diperlukan sudut pandang yang relevan yang mengarah pada orientasi politik masyarakat Suku Laut tersebut, yang dalam hal ini sangat berkaitan dengan proses demokrasi di Indonesia. Mengulas proses demokrasi di Indonesia tentunya tidak akan terlepas dari berbicara terkait Pilkada, yang dalam proses Pilkada tersebut memiliki hubungan yang kuat dengan partisipasi masyarakat dan hal tersebut tidak terkecuali partisipasi masyarakat Suku Laut.

Seperti yang telah di sampaikan sebelumnya masyarakat Suku Laut di Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga juga telah terlibat dalam proses pemilihan umum yaitu Pilkada Gubernur Kepulauan Riau pada tahun 2015. Pada tahun 2015 Pilkada Gubernur Kepri yang di ikuti oleh Pasangan Calon

Muhammad Sani dan Nurdin Basirun dengan Lawan politiknya pasangan calon Soerya Respationo dan Ansar Ahmad. Pilkada tersebut merupakan pemilu pertama yang diikuti oleh masyarakat Suku Laut.

Untuk lebih mendalami terkait keterlibatan masyarakat Suku Laut pada proses politik Pilkada, sebuah penelitian yang dilakukan Oleh, Indah Mulyani, Tahun 2017. Tentang *perilaku pemilih masyarakat suku laut sungai buluh kecamatan singkep barat kabupaten lingga*, dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Suku Laut beranggapan siapapun yang menjadi pemimpin mereka tidak akan mempengaruhi kehidupan mereka kearah yang lebih baik. Menilai anggapan Suku Laut ini tentunya ada pandangan tersendiri masyarakat Suku Laut terhadap kehidupan sosial politik, namun hal ini tentunya tidak memberikan arti hilangnya orientasi politik masyarakat Suku Laut dalam kehidupan sosial politik.

Perubahan sosial politik yang terjadi pada Suku Laut, dimulai dari masyarakat termasuk kategori masyarakat adat terpencil, memiliki budaya-budaya lokal sendiri dan hubungannya sangat minim dengan masyarakat pada umumnya, apalagi dengan pemerintahan dan sistem politiknya, Hingga kini Suku Laut menerima lingkungan masyarakat pada umumnya dan bahkan telah membuka diri terhadap pemerintah, serta mulai terbangunnya kesadaran adanya sistem politik, yang ditunjukkan dengan ikut sertanya mereka dalam

proses-proses politik seperti Pilkada tentunya menjadi hal yang menarik untuk menjadi salah satu topik kajian. Kini sebagian dari mereka telah menjadi penduduk Indonesia yang sah berdasarkan hukum Negara dan telah ikut andil dalam proses politik, meskipun masih ada yang tetap setia dengan kebudayaan hidup di laut hingga saat ini.

Berdasarkan hukum, KEPPRES NO. 111 tahun 1999 tentang pembinaan kesejahteraan sosial komunitas adat terpencil (KAT), menyatakan bahwa kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlihat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi, maupun politik. Kemudian KEPPRES tersebut diperbaharui dengan peraturan menteri sosial republik indonesia nomor 12 tahun 2015 tentang pelaksanaan peraturan Presiden nomor 186 tahun 2014 tentang pemberdayaan sosial terhadap komunitas adat terpencil menyatakan bahwa Komunitas Adat Terpencil yang selanjutnya disingkat dengan KAT adalah sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi, sosial budaya, miskin, terpencil, rentan sosial ekonomi.

Lebih lanjut Peraturan Menteri Sosial RI nomor 9 tahun 2012 tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, pasal 5 menyatakan bahwa Habitat KAT bertempat di dataran tinggi, pegunungan, dataran rendah, rawarawa,

daerah pedalaman, daerah perbatasan antar negara, di atas perahu dan atau daerah pinggir pantai.

Berdasarkan hukum masyarakat Suku Laut merupakan masyarakat KAT yang memiliki hak atas kesejahteraan sosial, ekonomi dan politik. Suku Laut merupakan masyarakat yang tinggal diatas perahu mendiami pantai-pantai. Menurut Pramono (2005: 131) bahwa “bagi mereka perahu adalah rumah sekaligus tempat untuk melakukan berbagai aktivitas keseharian”. Sewajarnya bentuk-bentuk keluaran orientasi politik maupun tipe dari budaya politik masyarakat Suku Laut menjadi hal yang penting untuk diperhatikan dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Seperti budaya politik masyarakat Suku Laut yang ada di Kecamatan Singkep Barat KAB Lingga.

Adanya perubahan sosial politik masyarakat Suku Laut yang dulunya termarginalisasi, hingga kini menjadi masyarakat yang lebih menyadari akan kehidupan sosial politik, menjadi suatu hal yang menarik bagi peneliti. Pergeseran dari masyarakat yang apatis terhadap pemerintah dan proses-proses politiknya hingga kini menjadi masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam proses politik, bahkan sepertinya mereka tidak sama sekali menyangkan untuk meninggalkan sistem kebudayaan yang telah lama mereka miliki. Penulis katakana menarik di atas bahwa adanya budaya politik yang terjadi pada masyarakat Suku Laut, untuk mengetahui lebih dalam

orientasi politik Suku Laut kiranya diperlukan sebuah kegiatan research atau penelitian terhadap Suku Laut tersebut.

Selanjutnya dengan permasalahan diatas menurut peneliti ada beberapa hal yang menjadi alasan kenapa penelitian ini perlu dilakukan oleh peneliti terhadap Suku Laut. *Pertama* adanya rasa ingin tahu peneliti terhadap permasalahan yang diteliti dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan. *Kedua* sebagai masukan terhadap pemerintah dalam membuat kebijakan yang berhubungan dengan Suku Laut, karena penelitian ini mencoba menggambarkan faktor pembentuk budaya politik masyarakat Suku Laut dan budaya politiknya. Tentunya hal ini dibutuhkan sebelum mengambil suatu kebijakan yang berkaitan dengan Suku Laut yang erat kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat. *Ketiga* kontribusi terhadap keilmuan sosial politik. Kontribusi terhadap keilmuan sosial politik yang peneliti maksud sangat erat kaitannya dengan studi budaya politik, bahwa dalam penelitian ini permasalahan yang dicoba untuk dibahas adalah mengenai orientasi politik dan tipe budaya politik Suku Laut. Fenomena tersebut membawa mereka pada pilihan yaitu apakah meninggalkan Sub-budaya yang mereka miliki dengan mengarah pada Negara atau memperjuangkan agar budaya mereka tetap diakui oleh Negara, demi terjaminnya kepentingan Suku Laut.

Menelaah kajian- kajian terdahulu yang berhubungan dengan Suku Laut, maka peneliti ingin mencoba melakukan sebuah penelitian dimana melihat permasalahan ini dari sudut pandang budaya politik masyarakat suku Laut pada Pilkada Gubernur Kepri tahun 2015. Orientasi politik dan tipe budaya politik pada Pilkada Gubernur Kepri tahun 2015 memberikan suatu pertanyaan kepada peneliti bagaimana sebenarnya budaya politik masyarakat Suku Laut.

1.2. Rumusan Masalah dan Tujuan

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran budaya politik masyarakat Suku Laut Kecamatan Singkep Barat dalam Pilkada Gubernur Kepri tahun 2015?
2. Faktor-faktor apa yang membentuk budaya politik masyarakat Suku Laut Kecamatan Singkep Barat dalam Pilkada Gubernur Kepri tahun 2015?

B. Tujuan

1. Untuk mendapatkan gambaran Budaya politik Suku Laut Kecamatan Singkep Barat?

2. Untuk mendapatkan gambaran Faktor-faktor apa yang membentuk budaya politik masyarakat Suku Laut Kecamatan Singkep Barat?